



# RENCANA KERJA TAHUN 2023

**DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BANYUWANGI**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi ini dapat diselesaikan sesuai dengan sistematika penyusunan yang telah ditetapkan. Penyusunan RENJA ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026, Peraturan Menteri Dalam Negeri 32 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 10 Tentang Perubahan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Kami sangat menyadari bahwa Penyusunan Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan Penyusunan Rencana Kerja ini agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023. Semoga Penyusunan Rencana Kerja ini bermanfaat bagi pembangunan di bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi.

Banyuwangi, Juli 2022

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO  
DAN PERDAGANGAN KAB.BANYUWANGI



Hj.RR.NANIN OKTAVIANTIE, S.Sos.,M.SI  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197410301994122001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
LATAR BELAKANG .....	1
LANDASAN HUKUM .....	1
MAKSUD DAN TUJUAN .....	6
SISTEMATIKA PENYUSUNAN .....	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU .....	8
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD .....	8
ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD .....	10
ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD .....	12
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd .....	18
PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT .....	24
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....	29
TELAAHAN KEBIJAKAN NASIONAL .....	31
TUJUAN DAN SASARAN .....	31
PROGRAM DAN KEGIATAN .....	33
BAB IV PENUTUP .....	42

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023 ini merupakan dokumen komprehensif berwawasan 1 (satu) tahun. Dokumen Rencana Kerja (RENJA) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Tahun 2021-2026 serta perwujudan program dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk Kabupaten Banyuwangi.

RENJA ini memuat program, kegiatan, tujuan, sasaran dan target yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di tahun 2023 dengan fokus utama pelayanan adalah menggerakkan ekonomi rakyat, percepatan pembangunan, peningkatan produktifitas dan kesejahteraan rakyat dalam kerangka kehidupan masyarakat yang berkelanjutan.

### **B. LANDASAN HUKUM**

Penyusunan RENJA Tahun 2023 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi ini merujuk pada:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Undang undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan

- Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 764) ;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  18. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 477);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Jawa Timur 2005-2025 (Lembaran Daerah Prov. Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 seri E);
  22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

- Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 9/E);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 10).
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 Nomor 2);
  27. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 Nomor 83).

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

RENJA Tahun 2023 ini disusun dengan MAKSUD untuk memberikan arah perencanaan, kebijakan dan program satuan kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan pada tahun 2023.

Dengan TUJUAN untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan di tahun 2023, maka tujuan yang ingin dicapai tetap sejalan dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Banyuwangi.

#### **D. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan RENJA Tahun 2023 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan sesuai dengan lampiran VI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan latar belakang penyusunan rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, maksud dan tujuan, landasan hukum dan sistematika penyusunan.

##### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

Menggambarkan pencapaian kinerja pelaksanaan rencana kerja tahun lalu (2021) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2022).

##### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Memaparkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2023.

##### **BAB IV PENUTUP**

Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

### A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Pada tahun 2021 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan melaksanakan total 11 program, 18 kegiatan dan 35 sub kegiatan dengan sebaran untuk masing-masing urusan sebagai berikut :



Gambar 2.1. Grafik pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021

Pengukuran kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 dalam mendukung capaian sasaran strategis pada renstra SKPD secara rinci tercantum dalam lampiran 1.

Dari tabel lampiran 1 dapat dianalisa beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan target Renja 2021 ada beberapa target indikator yang tidak tercapai 100% diantaranya :
  - a. Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi pengembangan usaha tercapai 83,57%.
  - b. Persentase UKM terhadap UMKM tercapai 89,26%.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target dari beberapa indikator kinerja disebabkan oleh hal-hal antara lain sebagai berikut :

- a. Pada indikator jumlah usaha mikro yang difasilitasi pengembangan usaha tidak dapat mencapai target dikarenakan pada kegiatan ini terdapat belanja yang tidak dapat terserap secara keseluruhan yaitu belanja paket/pengiriman. Belanja yang dimaksudkan untuk memfasilitasi jasa pengiriman produk para pelaku UMKM ini tidak terserap dengan maksimal karena banyak UMKM yang memilih alternatif jasa pengiriman lain sedangkan jasa pengiriman yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah hanya PT. POS Indonesia.
- b. Bantuan sosial berupa uang juga tidak dapat terserap secara maksimal karena waktu pelaksanaan dan penyelesaian administrasi yang tidak mencukupi.

Selain adanya target indikator kinerja yang tidak tercapai 100%, ada juga beberapa indikator yang sukses bahkan melampaui target yang ditetapkan tahun 2021 antara lain :

- a. Pertumbuhan PDRB Kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) tercapai 126,45%.
- b. Indeks harga konsumen makanan dan minuman tercapai 100,7%.
- c. Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai 100,08%.
- d. Persentase koperasi aktif tercapai 100,91%.
- e. Persentase koperasi sehat tercapai 189,80%.
- f. Persentase Peningkatan SDM pengelola koperasi tercapai 103,11%.
- g. Persentase peningkatan volume usaha koperasi tercapai 100%.
- h. Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha tercapai 110,40%.
- i. Persentase Usaha Mikro naik kelas 108,60%.
- j. Jumlah Realisasi Ekspor tercapai 813,90%.
- k. Rata-rata persentase kenaikan harga komoditas tercapai 167,07%.

## **B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD**

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi melaksanakan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan dua urusan pemerintahan yaitu Urusan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Urusan Perdagangan. Untuk menilai kinerja dari pelayanan sebuah SKPD diperlukan indikator-indikator dan target capaian kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Adapun yang digunakan untuk menilai kinerja pelayanan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator program dan kegiatan sebagaimana telah dianalisa di sub bab A di atas. Indikator tersebut adalah :

1. Indeks Harga Konsumen Makanan dan Minuman
2. Pertumbuhan PDRB Kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor)
3. Persentase koperasi berkualitas
4. Persentase UKM terhadap UMKM
5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Berdasarkan IKU tersebut, telah ditetapkan target-target kinerja kuantitatif seperti yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi dan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi yang dijadikan tolak ukur penilaian kinerja pelayanan SKPD selama 5 (lima) tahun perencanaan Renstra SKPD yaitu mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

Adapun realisasi tahun 2021 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.1  
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD  
Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SPM	IKK	TARGET RENSTRA		REALISASI	PROYEKSI	Catatan Analisis
				2021 Tahun (n-1)	2022 Tahun (n)	2021	2022	
1	2	3	4	6	7	8	10	11
1	Indeks harga konsumen makanan dan minuman			103,35%	106,32	104,17	106,32%	
2	Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan			9,31%	-	7,17	-	
3	Pertumbuhan PDRB Kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor)			-	6,17	-	6,17%	
3	Persentase koperasi berkualitas			12,78%	53,75	12,80	53,75%	
4	Persentase UKM terhadap UMKM			15%	8,37	13,39	8,37%	
5	Persentase kontribusi penyerapan tenaga kerja sektor usaha mikro kecil			89,45%	-	0	-	
6	Gini rasio pendapatan pedagang antar pasar			0,34	-	0,28	-	
7	Gini rasio pendapatan UMKM antar wilayah kecamatan			0,21	-	0	-	
8	Indeks kepuasan masyarakat			91	91,53	91,41	91,53	

Catatan analisis proyeksi target kinerja untuk masing-masing indikator sebagai berikut :

1. Pada indikator pertumbuhan PDRB sektor perdagangan, persentase UKM terhadap UMKM, capaian 2021 kurang dari target yang telah ditetapkan, oleh karena itu proyeksi tidak dilakukan secara linear atas target periode renstra 2021 – 2026, melainkan memperhatikan kondisi realisasi terakhir pada tahun 2021.
2. Hal yang sama juga dilakukan untuk indikator-indikator yang realisasinya melebihi dari target yang telah ditetapkan, penentuan proyeksi tidak sekedar dihitung linear kenaikannya berdasarkan target renstra 2021 – 2026, tetapi lebih memperhitungkan kondisi realisasi tahun terakhir.

### C. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi melayani 2 (dua) urusan penyelenggaraan pemerintahan dari 2 (dua) kementerian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PD, terdapat beberapa isu penting yang bisa menjadi permasalahan, hambatan, tantangan bahkan menjadi peluang dalam pengembangan sektor Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan. Adapun isu-isu penting tersebut antara lain:

1. Pentingnya menindaklanjuti Permendagri nomor 9 tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah dimana setiap tahun harus ditetapkan Produk Unggulan Daerah dengan Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Pengembangan PUD ditingkat SKPD dengan pendekatan antara lain:
  - a. Model Inkubator
  - b. Pendekatan Klaster
  - c. *One Village One Product* dan Kompetensi Inti
2. Pengembangan produk unggulan daerah dilaksanakan melalui peningkatan kualitas dan daya tarik, promosi dan investasi, kerjasama, peran serta masyarakat dan perlindungan terhadap PUD.
3. Batik yang menjadi OVOP Kabupaten Banyuwangi perlu ditingkatkan dan dikembangkan baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi.
4. Belum optimalnya pengembangan UMKM dalam meningkatkan nilai tambah produk.
5. Lemahnya daya saing ekonomi kreatif
6. Kurangnya standarisasi produk UKM
7. Perlunya peningkatan penumbuhan wirausaha baru berbasis sumberdaya lokal berdaya saing global

8. Munculnya lembaga keuangan lain yang kegiatannya identik dengan usaha koperasi yang dapat :
  - a. Menghambat perkembangan usaha koperasi.
  - b. Menurunkan daya saing usaha koperasi
9. Adanya lembaga keuangan lain yang kegiatannya sama dengan UM yang dapat :
  - a. Menghambat perkembangan UM.
  - b. Menurunkan daya saing UM.
  - c. Dapat mematikan UM karena terjerat bunga pinjaman tinggi sehingga sulit berkembang dan cenderung mati.
10. Banyaknya produk-produk beredar di pasaran yang tidak memenuhi kaidah standarisasi
11. Minimnya kesadaran pelaku usaha untuk melakukan tera ulang terhadap alat-alat UTTP
12. Kurang memadainya infrastruktur rantai pasok perdagangan
13. Tingginya fluktuasi harga kebutuhan pokok masyarakat
14. Pentingnya memanfaatkan jaringan perdagangan antar pulau untuk memperluas jaringan perdagangan pasar domestik
15. Rendahnya cakupan binaan kelompok pedagang kecil.

Dari isu-isu penting diatas dapat direkomendasikan beberapa catatan strategis sebagai berikut :

1. Lebih mengintensifkan pelaksanaan metrologi legal dan pengawasan barang dan jasa dalam rangka menjamin hak-hak konsumen warga Kabupaten Banyuwangi terlindungi.
2. Perdagangan sebagai sektor penyumbang PDRB terbesar ke-2 perlu untuk lebih ditingkatkan lagi melalui revitalisasi pasar-pasar rakyat, perluasan cakupan pembinaan kelompok-kelompok pedagang kecil serta mengoptimalkan jalur perdagangan antar daerah / antar pulau salah satunya dengan menjalin kerjasama kemitraan dengan 24 (dua puluh empat) kantor perwakilan dagang yang berada di

berbagai propinsi di Indonesia serta pengoptimalan fungsi Sistem Resi Gudang.

3. Penting juga untuk ditingkatkan adalah monitoring perkembangan harga bahan pokok tidak hanya pada 15 (lima belas) pasar rakyat tetapi juga pasar-pasar rakyat di 25 (dua puluh lima) kecamatan se Kabupaten Banyuwangi yang di update setiap hari dan disajikan secara online dalam rangka mengurangi disparitas harga bahan pokok antar wilayah kecamatan, yang harus ditindaklanjuti pula dengan adanya operasi pasar / pasar murah di beberapa wilayah utama untuk meredam fluktuasi harga bahan kebutuhan pokok masyarakat.
4. Pengembangan Koperasi dan UM membutuhkan manajemen usaha yang diperlukan untuk mengelola secara profesional sesuai dengan azas efisien dan efektifitas. Dalam pelaksanaan untuk berusaha tentunya tidak semudah yang kita harapkan berhasil begitu saja, namun permasalahan–permasalahan seperti masalah permodalan, pemasaran, manajemen, perijinan dan masalah sumber daya manusia.
5. Adanya permasalahan–permasalahan pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan menyediakan Rumah Kreatif. Adanya Rumah Kreatif diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pelaku usaha UM, kelompok mitra binaan untuk berkonsultasi, menerima informasi dan lainnya dapat meningkatkan usahanya mendorong pelaku UMKM untuk bias menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Rumah Kreatif menyediakan jasa layanan untuk memenuhi kebutuhan UMKM dalam rangka meningkatkan daya saing dan daya beli produk UMKM sehingga pada akhirnya akan memperkuat perekonomian khususnya Kabupaten Banyuwangi.

Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD bahwa Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi terdiri dari lingkungan internal dan eksternal.

### ***Analisis Lingkungan Internal***

- **Kekuatan**

Dalam mencermati atau menganalisis lingkungan internal, kondisi internal dan data yang ada dan beberapa faktor yang merupakan Kekuatan (*Strength*) Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi adalah :

1. Tersedianya sumber daya manusia aparatur yang berkualitas.
2. Tersedianya Anggaran APBD maupun dari APBN di Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi.
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam penyelenggaraan pemerintahan.
4. Adanya peraturan perundang undangan di bidang Koperasi UKM dan Perdagangan.

- **Kelemahan**

Dari pengamatan kondisi dan data yang ada, beberapa faktor yang dianggap merupakan Kelemahan (*Weakness*) Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi adalah :

1. Kurangnya kemampuan dan pemahaman sumberdaya manusia menghadapi permasalahan tentang Koperasi UM dan Perdagangan.
2. Masih lemahnya sinergitas antar sektor.
3. Kurangnya sistim pelaporan dan informasi dunia usaha bidang Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan.
4. Kurangnya pemahaman akan peraturan perundang undangan di bidang Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan.

### ***Analisis Lingkungan Eksternal***

- **Peluang**

Dari pencermatan kondisi eksternal dan data ancaman/ tantangan (*Threats*) pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi adalah :

1. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah.
2. Adanya dukungan kebijakan pemerintah terhadap keberadaan Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan.
3. Masih terbukanya peluang pasar terhadap produk usaha mikro.
4. Besarnya potensi pelaku usaha baik usaha koperasi, usaha produksi skala mikro maupun pelaku usaha perdagangan.
5. Besarnya potensi kemitrologian sebagai sumber pendapatan daerah.

- **Ancaman**

Dari pengamatan kondisi eksternal dan data yang ada, ada beberapa faktor yang dianggap merupakan peluang (*Opportunities*) Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi adalah :

1. Tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan.
2. Terbatasnya bantuan anggaran dari pusat, provinsi maupun daerah.
3. Masuknya produk-produk import yang menambah ketatnya persaingan produk -produk UM.
4. Berdirinya pusat-pusat perbelanjaan modern dan lembaga keuangan lain yang mengancam keberadaan Koperasi dan Usaha Mikro.
5. Fluktuasi harga bahan pokok yang cukup tinggi.
6. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana perdagangan tradisional.

Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan tahun yang direncanakan yaitu Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi mempunyai program inovasi

pelayanan publik antara lain: PAKU KREMAS (Pelayanan Kolaborasi UMKM dengan Rumah Kreatif secara Masif), PROGO WANGI (Program Gratis Ongkos Kirim Banyuwangi), WENAK (Warung Naik Kelas), dan TUR (Teman Usaha Rakyat). Program-program inovasi tersebut selain untuk meningkatkan kualitas para pelaku usaha mikro namun juga untuk memudahkan para usaha memasarkan produk hasil produksi UM, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi. Selain itu juga melakukan kegiatan pembinaan, bimbingan, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan serta fasilitasi pengembangan usaha Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan, diharapkan akan tumbuh koperasi dan usaha mikro yang tangguh dan kompetitif dari segi produksi, teknologi, permodalan maupun pemasaran sehingga kegiatan usaha yang ada akan semakin tangguh dan berkualitas/fasilitasi juga diberikan dalam hal peningkatan kerjasama kemitraan antar pelaku usaha itu sendiri maupun dengan instansi pemerintah seperti pembentukan kelompok usaha, pembentukan sentra-sentra usaha, kemitraan dalam hal pemasaran maupun kemitraan dan permodalan.

Berdasarkan potensi dan upaya-upaya tersebut diharapkan ada peningkatan yang signifikan pada kegiatan usaha, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dengan peningkatan jumlah pelaku usaha baik Koperasi maupun usaha mikro terhadap kualitas barang dan jasa yang dihasilkan, peningkatan kualitas kelembagaan usaha, peningkatan jaringan pemasaran, peningkatan permodalan, peningkatan kerjasama kemitraan dan peningkatan kesadaran tertib niaga, diharapkan akan menciptakan usaha yang tangguh, mandiri dan profesional yang bisa menggerakkan roda perekonomian Kabupaten Banyuwangi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan penyediaan lapangan kerja, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan serta daya beli masyarakat.

Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, bermacam macam kegiatan usaha yang dilakukan, baik itu usaha perorangan atau usaha yang berbadan hukum. Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dibedakan jadi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi selalu menganut prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas dengan memperhatikan faktor kesopanan dan keramahan serta kepuasan masyarakat, adapun jenis pelayanan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi yaitu :

1. Pelayanan Konsultasi Kop-UMKM (Koperasi-Usaha Mikro Kecil dan Menengah)
2. Marketing Online ( [www.banyuwangi-mall.com](http://www.banyuwangi-mall.com) ) Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi
3. Website Klinik UMKM dengan alamat : [klinikumkm.banyuwangikab.go.id](http://klinikumkm.banyuwangikab.go.id).
4. Website Produk Unggulan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi dengan alamat : [produkukmbanyuwangi.com](http://produkukmbanyuwangi.com).

#### **D. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Pada rancangan awal RKPD 2023 telah direncanakan pelaksanaan program kegiatan untuk urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sebanyak 6 program, 11 kegiatan, dan 26 sub kegiatan. Sedangkan untuk urusan Perdagangan sebanyak 3 program, 5 kegiatan, dan 7 sub kegiatan dengan total anggaran yang menjadi pagu SKPD sebesar Rp. 26.888.655.442,-. Mengingat keterbatasan anggaran yang menjadi pagu SKPD maka program kegiatan lainnya hasil dari analisa kebutuhan yang belum diakomodir pada rancangan awal RKPD terutama yang diperkirakan akan menjadi usulan dari masyarakat melalui proses

musrenbang akan diakomodir menggunakan pagu anggaran kecamatan sesuai hasil musrenbang.

Adapun hasil review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dibandingkan dengan kebutuhan pelayanan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan secara rinci adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.2  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023  
Kabupaten Banyuwangi

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>2170101</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					
21701012.01	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					
21701012.0101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan,	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang	5 Dokumen	40.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan,	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang	5 Dokumen	40.000.000	
21701012.0106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan capaian kinerja perangkat daerah yang disusun	6 Laporan	40.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan capaian kinerja perangkat daerah yang disusun	6 Laporan	40.000.000	
21701012.02	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					
21701012.0201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan,	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	65 Orang	9.148.432.415	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan,	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	65 Orang	9.148.432.415	
21701012.0204	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan,	Jumlah laporan keuangan yang disusun	12 Laporan	40.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan,	Jumlah laporan keuangan yang disusun	12 Laporan	40.000.000	
21701012.06	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					
21701012.0601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan,	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	293 Buah	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan,	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	293 Buah	10.000.000	
21701012.0602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peralatan dan perlengkapan	1591 Buah	200.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peralatan dan perlengkapan	1591 Buah	200.000.000	
21701012.0603	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	700 Buah	50.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	700 Buah	50.000.000	
21701012.0604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan,	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	3500 Kotak 26041 Liter	250.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan,	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	3500 Kotak 26041 Liter	250.000.000	
21701012.0605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan,	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	9326 Lembar	30.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan,	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	9326 Lembar	30.000.000	
21701012.0606	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan,	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1988 Eksemplar	9.342.520	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan,	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1988 Eksemplar	9.342.520	
21701012.0608	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Banyuwangi,	Jumlah makanan dan minuman tamu yang disediakan	3500 Kotak	17.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Banyuwangi,	Jumlah makanan dan minuman tamu yang disediakan	3500 Kotak	17.000.000	
21701012.0609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Banyuwangi,	Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	2858 Kotak 7000 OH	500.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Banyuwangi,	Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	2858 Kotak 7000 OH	500.000.000	

21701012.07	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
21701012.0705	Pengadaan Mebel	Kab. Banyuwangi,	Jumlah mebel yang diadakan	44 Buah	100.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Banyuwangi,	Jumlah mebel yang diadakan	44 Buah	100.000.000
21701012.0710	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Kab. Banyuwangi,	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	4 Buah	100.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Kab. Banyuwangi,	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	4 Buah	100.000.000
21701012.08	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
21701012.0801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Banyuwangi,	Jumlah peranko, materai dan benda pos lainnya yang disediakan	1667 Buah	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Banyuwangi,	Jumlah peranko, materai dan benda pos lainnya yang	1667 Buah	5.000.000
21701012.0802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Banyuwangi,	Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 Tagihan	450.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Banyuwangi,	Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 Tagihan	450.000.000
21701012.0804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Banyuwangi,	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2100 OB	3.360.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Banyuwangi,	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2100 OB	3.360.000.000
21701012.09	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
21701012.0902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Kab. Banyuwangi,	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	8 unit aktifas	100.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Kab. Banyuwangi,	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang	8 unit aktifas	100.000.000
21701012.0905	Pemeliharaan Mebel	Kab. Banyuwangi,	Jumlah mebel yang dipelihara	20 unit	20.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Banyuwangi,	Jumlah mebel yang dipelihara	20 unit	20.000.000
21701012.0906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Banyuwangi,	Jumlah peralatan/perlengkapan kantor yang dipelihara	16 Unit aktifas	10.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Banyuwangi,	Jumlah peralatan/perlengkapan kantor yang dipelihara	16 Unit aktifas	10.000.000
21701012.0909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Banyuwangi,	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 Unit aktifas	200.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Banyuwangi,	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang	1 Unit aktifas	200.000.000
21701012.0910	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Kab. Banyuwangi,	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang	28 Unit aktifas	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Kab. Banyuwangi,	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan	28 Unit aktifas	10.000.000
21703	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>					<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>				
217032.01	<b>Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>					<b>Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>				
217032.0101	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Kelangguhan, serta Akuntabilitas	Kab. Banyuwangi,	Jumlah koperasi yang diawasi	896 koperasi	99.971.960	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Kelangguhan, serta	Kab. Banyuwangi,	Jumlah koperasi yang diawasi	896 koperasi	100.000.000
21704	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>					<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>				
217042.01	<b>Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>				
217042.0101	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Banyuwangi,	Jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatannya	120 koperasi	99.971.960	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Banyuwangi,	Jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatannya	120 koperasi	100.000.000

21705	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>					<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>				
217052.01	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota					Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				
217052.0101	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan	Kab. Banyuwangi,	Jumlah peserta peningkatan pemahaman dan pengetahuan	200 orang	459.181.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta	Kab. Banyuwangi,	Jumlah peserta peningkatan pemahaman dan pengetahuan	200 orang	525.169.930
21706	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>					<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>				
217062.01	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota					Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
217062.0101	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan,	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah koperasi yang difasilitasi pemberdayaan	100 koperasi	99.995.320	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah koperasi yang difasilitasi pemberdayaan	100 koperasi	100.000.000
21707	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>					<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>				
217072.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan					Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				
217072.0101	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan,	Jumlah aplikasi yang diadakan	1 unit	250.000.000	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan,	Jumlah aplikasi yang diadakan	1 unit	250.000.000
217072.0102	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan,	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi kemitraan	600 usaha mikro	100.000.000	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan,	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi kemitraan	600 usaha mikro	100.000.000
217072.0104	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah orang yang mengikuti pemberdayaan	50 orang	-	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah orang yang mengikuti pemberdayaan	50 orang	100.000.000
21708	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>					<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>				
217082.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil					Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				
217082.0101	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dan Pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM,	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi Pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM,	1000 usaha mikro	2.532.442.930	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dan Pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM,	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi Pengembangan produksi dan pengolahan,	1000 usaha mikro	2.559.995.460
330	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>				
33003	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>					<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>				
330032.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan					Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				
330032.0101	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Banyuwangi,	Jumlah pasar yang mendapatkan penambahan sarana dan	10 pasar	2.350.000.000	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Banyuwangi,	Jumlah sarana distribusi perdagangan	2 Unit	2.350.000.000
330032.0102	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Banyuwangi,	Jumlah pasar daerah yang dikelola	21 Pasar	300.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Banyuwangi,	Jumlah sarana distribusi perdagangan	21 Pasar	325.000.000

330032.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya					Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				
330032.0201	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Banyuwangi,	Jumlah pasar yang menerima pembinaan kebersihan dan	21 pasar	11.550.000	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi	Kab. Banyuwangi,	Jumlah pasar yang menerima pembinaan kebersihan dan	21 pasar	11.550.000
33004	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>					<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>				
330042.01	<b>Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>					<b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>				
330042.0102	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi kemitraan perdagangan antar daerah	250 pelaku usaha	50.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi kemitraan perdagangan antar daerah	250 pelaku usaha	50.000.000
330042.0103	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan,	Jumlah aktifitas pengendalian ketersediaan barang pokok	1440 Aktifitas	50.000.000	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan,	Jumlah aktifitas pengendalian ketersediaan barang pokok	1440 Aktifitas	50.000.000
330042.02	<b>Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>					<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>				
330042.0202	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan,	Jumlah aktifitas monitoring harga bahan pokok	5475 aktifitas	200.000.000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Kab. Banyuwangi,	Jumlah aktifitas pemantauan harga dan stok barang	5475 aktifitas	200.000.000
330042.0203	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan,	Jumlah aktifitas operasi pasar dan pasar murah yang dilaksanakan	30 aktifitas	50.000.000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Kab. Banyuwangi,	Jumlah aktifitas pemantauan harga dan stok barang	5475 aktifitas	100.000.000
33005	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>					<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>				
330052.01	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>				
330052.0101	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Kab. Banyuwangi,	-Jumlah aktifitas operasi pasar dan pasar murah yang dilaksanakan -Jumlah negara tujuan ekspor yang diupdate informasi peluang	4 aktifitas 25 negara 7 jenis	200.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Kab. Banyuwangi,	-Jumlah aktifitas operasi pasar dan pasar murah yang dilaksanakan -Jumlah negara tujuan ekspor	4 aktifitas 25 negara 7 jenis	200.000.000
330052.0102	Pameran Dagang Nasional	Kab. Banyuwangi,	Jumlah keikutsertaan pameran promosi skala internasional	1 kali	400.000.000	Pameran Dagang Nasional	Kab. Banyuwangi,	Jumlah keikutsertaan pameran promosi skala internasional	1 kali	400.000.000
330052.0103	Pameran Dagang Lokal	Kab. Banyuwangi,	Jumlah keikutsertaan pameran promosi skala nasional	6 kali	100.000.000	Pameran Dagang Lokal	Kab. Banyuwangi,	Jumlah keikutsertaan pameran promosi skala nasional	6 kali	100.000.000
33006	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>					<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>				
330062.01	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>					<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>				
330062.0101	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Banyuwangi,	-Jumlah alat UTTP yang didata -Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang	1 unit 63000 unit 63000 unit	300.000.000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Banyuwangi,	-Jumlah alat UTTP yang didata -Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang	1 unit 63000 unit 63000 unit	300.000.000

**E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi akan menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi – asosiasi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kecamatan.

Usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui Musrenbang Kecamatan dalam Forum sebagaimana terlampir sebagai berikut:

Tabel 2.3  
Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023  
Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Detail	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Anggaran	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.17.8	Program Pengembangan UMKM						
2.17.8.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil						
2.17.8.2.01.1	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Peningkatan Kualitas Kompetensi dan Manajerial SDM Usaha Mikro	Ds. Badewang Kec. Songgon	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	20 OH	30.000.000	
		Pelatihan Branding dan Marketing Online	Ds. Sukorejo Kec. Bangorejo	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	20 orang	30.000.000	
			Kel. Kertosari Kec. Banyuwangi	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	20 orang	30.000.000	
			Kec. Cluring	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	20 orang	30.000.000	
			Ds. Gentengwetan dan Ds. Kaligondo Kec. Genteng	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	20 orang	25.000.000	
			Ds. Olehsari Kec. Glagah	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	20 orang	30.000.000	
			Ds. Sepanjang Kec. Glenmore	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	20 orang	30.000.000	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Detail	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Anggaran	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Ds. Benelanlor Kec. Kabat	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	20 orang	30.000.000	
			Kel. Gombengsari Kec. Kalipuro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	20 orang	30.000.000	
			Kec. Pesanggaran	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	20 orang	30.000.000	
			Ds. Bulurejo dan Ds. Purwoharjo Kec. Purwoharjo	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	20 orang	30.000.000	
			Ds. Singolatrenc Kec. Singojuruh	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	20 orang	30.000.000	
			Ds. Bajulmati Kec. Wongsorejo	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	20 orang	30.000.000	
		Pelatihan Kerajinan	Kel. Singonegaran Kec. Banyuwangi	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	20 orang	40.000.000	
			Kel. Klatak Kec. Kalipuro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	20 orang	40.000.000	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Detail	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Anggaran	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Ds. Tambakrejo Kec. Muncar	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	20 orang	40.000.000	
			Kec. Purwoharjo	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	Pelatihan kerajinan dari limbah sampah, 20 orang	30.000.000	
			Ds. Siliragung Kec. Siliragung	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	20 orang	40.000.000	
			Ds. Cantuk dan Ds. Sumberbaru Kec. Singojuruh	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	20 orang	40.000.000	
			Ds. Sukonatar Kec. Srono	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	20 orang	35.000.000	
			Ds. Kedungwungu dan Ds. Tegaldlimo Kec. Tegaldlimo	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	20 orang	40.000.000	
		Pelatihan Olahan Makanan / Kuliner	Kel. Kebalenan, Kel. Sobo dan Kel. Kepatihan Kec. Banyuwangi	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	20 orang	30.000.000	
			Ds. Wringinagung dan Ds. Gambiran Kec. Gambiran	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	20 orang	30.000.000	
			Ds. Margomulyo, Ds. Bumiharjo dan Ds. Sumbergondo Kec. Glenmore	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	20 orang	30.000.000	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Detail	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Anggaran	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Ds. Bangunsari, Ds. Sumberarum dan Ds. Balak Kec. Songgon	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	20 orang	30.000.000	
			Ds. Tegalsari Kec. Tegalsari	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	20 orang	30.000.000	
		Pelatihan Kue Basah/Kering	Ds. Gentengkulon Kec. Genteng	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	20 orang	35.000.000	
			Kel. Bakungan Kec. Glagah	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	20 orang	35.000.000	
			Ds. Gitik Kec. Rogojampi	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	20 orang	35.000.000	
			Ds. Temuguruh Kec. Sempu	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	20 orang	35.000.000	
			Ds. Sragi dan Ds. Parangharjo Kec. Songgon	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	20 orang	35.000.000	
			Ds. Kebaman Kec. Songgon	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	20 orang	35.000.000	
		Pelatihan Membuat	Ds. Tambong Kec. Kabat	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	20 orang	45.000.000	
		Pelatihan Hantaran	Ds. Kalibaruwetan dan Ds. Banyuwanyar Kec. Kalibaru	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	20 orang	30.000.000	
		Pelatihan Pembuatan Tas	Ds. Bangorejo Kec. Bangorejo	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	20 orang	35.000.000	

### **BAB III**

## **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **A. TELAAHAN KEBIJAKAN NASIONAL**

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menelaah kebijakan dan program prioritas nasional sebagai upaya mensinergikan program pusat dan daerah.

Karenanya pada bab ini tertuang hasil telaahan kebijakan dan program pembangunan nasional yang melekat pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi. Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 7 prioritas Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Adapun program dan kegiatan prioritas nasional untuk kebijakan tersebut yaitu :

1. Penguatan kewirausahaan dan UMKM;
  - a. Peningkatan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar;
  - b. Peningkatan akses pembiayaan bagi wirausaha;
  - c. Peningkatan kapasitas, jangkauan dan inovasi koperasi;
  - d. Peningkatan penciptaan peluang usaha.
2. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja;
  - a. Peningkatan peran dan kerja sama pendidikan dan pelatihan vokasi dunia usaha;
  - b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi;
  - c. Peningkatan sertifikasi kompetensi;
  - d. Peningkatan tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi.
3. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN);
  - a. Peningkatan diversifikasi nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa;
  - b. Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;
  - c. Peningkatan efektivitas *Free Trade Agreement* (FTA) dan diplomasi ekonomi;
  - d. Peningkatan partisipasi dalam *Global Production Network* / *GPN (Inbound dan Outbound)*;
  - e. Pengelolaan impor;
  - f. Peningkatan pengadaan pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri;
  - g. Peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran pariwisata dan produk kreatif.
4. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
  - a. Peningkatan pendalaman sektor keuangan;

- b. Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan *industry* 4.0;
- c. Penguatan sistem logistik dan stabilisasi harga;
- d. Peningkatan pengembangan industri dan pariwisata yang berkelanjutan;
- e. Peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital;
- f. Reformasi fiskal.

## B. TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RENSTRA Tahun 2021-2026 maka disusun Rancangan Awal Renja 2023 untuk menentukan kegiatan tahunan, sedangkan untuk program terpilih adalah pada program atau kegiatan – kegiatan yang diusulkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan telah mendapat persetujuan serta dukungan anggaran pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam bentuk DPA Perangkat Daerah tahun bersangkutan.

### ❖ Tujuan

Merupakan pernyataan mengenai kinerja yang diinginkan oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan misi pembangunan. Terdapat 2 misi Pemerintah Daerah yang dapat diimplementasikan berdasarkan tugas dan wewenang Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan yaitu:

- Misi 1 “Membangun ekonomi inklusif dan pemerataan infrastruktur yang mampu mengungkit produktifitas sektor unggulan dan menguatkan ketahanan lingkungan”.

Tujuan dari misi tersebut adalah Meningkatkan produktifitas dan daya saing sektor koperasi, usaha mikro dan perdagangan yang berkelanjutan. Untuk menilai keberhasilan tujuan ini pada akhir periode Renstra, dapat diukur dengan indikator pertumbuhan PDRB ADHB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,72%. Sehingga agar tujuan ini

dapat dicapai maka penunjang peningkatan produktifitas dan daya saing sektor koperasi, usaha mikro dan perdagangan harus ditingkatkan.

- Misi 2 “Membangun SDM Unggul, Berkarakter dan Harmonisasi Sosial yang Kondusif”.

Tujuan dari misi tersebut adalah Meningkatkan Akses dan Kualitas Komoditas Perdagangan. Untuk menilai keberhasilan tujuan ini pada akhir periode Renstra, dapat diukur dengan indikator Indeks Harga Konsumen dengan target sebesar 111 indeks. Sehingga agar tujuan ini dapat dicapai maka laju pertumbuhan masing-masing sub sektor harus selalu ditingkatkan secara signifikan melebihi laju pertumbuhan ekonomi daerah.

#### ❖ Sasaran

Merupakan suatu target atau sesuatu yang diinginkan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan Kabupaten Banyuwangi yang sesuai dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi yaitu:

1. Meningkatnya pengembangan koperasi, usaha mikro dan perdagangan. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja:
  - a. Pertumbuhan PDRB Kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor)
  - b. Persentase UKM terhadap UMKM
  - c. Persentase koperasi berkualitas
  - d. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Meningkatnya Meningkatkan daya beli masyarakat melalui stabilisasi harga komoditas perdagangan. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja:
  - a. Indeks harga konsumen makanan dan minuman

### C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2023 merupakan rangkaian upaya untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Banyuwangi sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 – 2026 dan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Tahun 2021-2026. Rencana program yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan beserta indikator capaian kinerjanya yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 adalah sebagai berikut :

#### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
- Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Mebel
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## **2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi**

Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota.

- Sub kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan detail kegiatan:
  - Pengawasan Koperasi
  - Pembubaran Koperasi Pasif
  - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Koperasi
  - Pembangunan Sistem Informasi Perkoperasian
  - Pemingkatan Koperasi

### **3. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi**

Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

- Sub kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan detail kegiatan:
  - Penilaian Kesehatan Koperasi
  - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Usaha Simpan Pinjam

### **4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**

Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota.

- Sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi dengan detail kegiatan:
  - Pemahaman Prinsip-Prinsip Perkoperasian
  - Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM)
  - Pelatihan Manajemen Usaha Simpan Pinjam

### **5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**

Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota.

- Sub kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan detail kegiatan:
  - Peningkatan Kelembagaan Koperasi
  - Revitalisasi Koperasi
  - Penilaian dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
  - Fasilitasi Permodalan Usaha Simpan Pinjam
  - Temu Usaha bagi Pelaku Perkoperasian
  - Pengembangan Toko Ritel Modern Koperasi
  - Fasilitasi Promosi Hasil Usaha Koperasi
  - Fasilitasi Pengembangan Usaha Sektor Riil Koperasi

#### **6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)**

Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.

- Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro dengan detail kegiatan Pemetaan dan Penyusunan Potensi UMKM
- Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro dengan detail kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Mikro
- Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro dengan detail pekerjaan:
  - Penguatan Kelembagaan dan Organisasi Kelompok Usaha Mikro
  - Peningkatan Kualitas, Kompetensi dan Manajerial SDM Usaha Mikro
  - Penguatan Kelembagaan Wirausaha Mikro Baru

## **7. Program Pengembangan UMKM**

Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil.

- Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi dengan detail kegiatan:
  - Fasilitasi Promosi Hasil Produksi Usaha Mikro
  - Pengembangan Sarana Pemasaran Hasil Produksi Usaha Mikro
  - Penguatan Fasilitasi Pendampingan dan Konsultasi Usaha Mikro
  - Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
  - Fasilitasi Penumbuhan Wirausaha Baru
  - Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat

## **8. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**

a. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.

- Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan detail kegiatan:
  - Pengembangan Sistem Resi Gudang
  - Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pasar
  - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan detail kegiatan:
  - Optimalisasi Pengelolaan Pasar Daerah
  - Pendataan dan Penyusunan Profil Pasar Rakyat

b. Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya.

- Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan dengan detail kegiatan:

- Pembinaan Manajemen Usaha Kelompok Pedagang Pasar
- Penguatan Kelembagaan Kelompok Pedagang Pasar
- Pembinaan Kebersihan dan Ketertiban Pasar

## **9. Program Stabilisasi Harga Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting**

- a. Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Peningkatan aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat dengan detail kegiatan:
    - Pembinaan Organisasi Kelompok Pedagang Kecil
    - Pengembangan Jaringan Pemasaran Perdagangan antar Daerah
  - Sub Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat dengan detail pekerjaan:
    - Monitoring Arus Perdagangan antar Daerah
    - Monitoring, Pembinaan dan Penataan Pergudangan
- b. Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
  - Sub kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan dengan detail kegiatan:
    - Monitoring dan Penyebaran Informasi Perkembangan Harga Komoditas Perdagangan
  - Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota dengan detail kegiatan:
    - Fasilitasi Operasi Pasar dan Pasar Murah

- c. Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan detail kegiatan:
    - Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

#### **10. Program Pengembangan Ekspor**

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

- Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota dengan detail kegiatan:
  - Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri
  - Koordinasi Pengembangan Ekspor dengan Instansi Terkait, Asosiasi dan Pengusaha
  - Pengembangan Data Base Informasi Potensi Unggulan
- Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional dengan detail kegiatan Pengembangan Promosi Perdagangan Internasional
- Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal dengan detail kegiatan Keikutsertaan Pameran Promosi Produk Potensi Ekspor

#### **11. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen**

Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan.

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dengan detail kegiatan:
  - Pendataan Potensi Pemanfaatan Alat UTTP
  - Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Alat UTTP
  - Pengembangan Sarana Kemetrolgian
- Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal dengan detail kegiatan:
  - Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Tertib Niaga bagi Pelaku Usaha dan Masyarakat

- Pengawasan Pelaksanaan Metrologi Legal
- Optimalisasi Pemanfaatan Pos Ukur Ulang

## **12. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**

Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota dengan detail kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/produk
- Sub Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan dengan detail kegiatan:
  - Updating Data Pelaku Usaha Perdagangan
  - Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu, Bekas, Salah Personalisasi, Salah Peruntukan dan atau yang Tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran

Penentuan program dan kegiatan tidak terlepas dari fokus pembangunan daerah, oleh karena itu keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 akan diukur melalui capaian indikator kinerja salah satunya adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD 2021 – 2026 dan Renstra 2021 – 2026.

Adapun rincian Indikator Kinerja Utama, penjelasan serta keterkaitannya dengan tujuan serta sasaran SKPD dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Indikator Kinerja Utama  
(IKU)

A. INDIKATOR KINERJA TUJUAN SKPD					
NO.	TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KET.
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan produktifitas dan daya saing sektor koperasi, usaha mikro dan perdagangan yang berkelanjutan	Pertumbuhan PDRB ADHB kategori G (Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor)	PDRB ADHB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Tahun (n) - PDRB ADHB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Tahun (n-1) ..... x 100% PDRB ADHB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Tahun (n-1)	- BPS diolah SKPD	- Bidang Perdagangan
2	Membangun SDM Unggul Berkarakter dan Harmonisasi Sosial yang Kondusif	Indeks harga konsumen	Nilai indeks harga konsumen Tahun n	- BPS diolah SKPD	- Bidang Perdagangan
B. INDIKATOR KINERJA SASARAN SKPD					
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KET.
1	2	3	4	5	6
1.1	Meningkatnya pengembangan koperasi, usaha mikro dan perdagangan	Persentase koperasi berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset (n) ..... x 100% Jumlah seluruh koperasi Tahun (n)	Laporan penilaian KSP/USP sehat dan data keragaan koperasi	- Bidang Koperasi
		Persentase UKM terhadap UMKM	Jumlah UKM non pertanian Tahun (n) ..... x 100 % Jumlah UMKM non pertanian di Tahun (n)	- BPS - Laporan perkembangan wirausaha kab. Banyuwangi	- Bidang Usaha Mikro
		Pertumbuhan PDRB kategori G (Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor)	PDRB ADHK Sektor Perdagangan Tahun (n) - PDRB ADHK Sektor Perdagangan Tahun (n-1) ..... x 100% PDRB ADHK Sektor Perdagangan Tahun (n-1)	BPS diolah SKPD	- Bidang Perdagangan dan Bidang Pasar
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat hasil survei	Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	- Sekretariat
2.1	Meningkatnya daya beli masyarakat melalui stabilitasi harga komoditas perdagangan	Indeks harga konsumen makanan dan minuman	Nilai indeks harga konsumen makanan dan minuman Tahun n	BPS	- Bidang Perdagangan

Berdasarkan IKU tersebut di atas, perlu untuk dilakukan perencanaan kinerja dengan menetapkan target kinerja pada tiap indikator yang nantinya akan dicapai dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun perencanaan kinerja tahun 2023 sebagaimana terlampir.

## **BAB IV PENUTUP**

Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi ini merupakan rancangan awal rencana kerja tahunan yang berisi rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 dengan target kinerja yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan bidang koperasi usaha kecil menengah dan perdagangan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Banyuwangi.

Rumusan program dan kegiatan yang direncanakan sepenuhnya bersumber dari APBD Kabupaten Banyuwangi. Dalam rangka memaksimalkan capaian kinerja yang ditargetkan, beberapa kegiatan juga telah diusulkan melalui APBD Propinsi maupun APBN. Tidak menutup kemungkinan capaian kinerja juga ditunjang dari kegiatan-kegiatan non APBD yang merupakan kegiatan inovasi hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

Dengan disusunnya dokumen Rencana Kerja 2023 ini, arah dan tujuan penyelenggaraan pembangunan di bidang koperasi usaha kecil menengah dan perdagangan Tahun 2023 yang merupakan penjabaran visi dan misi SKPD akan lebih terukur, terkoordinasi, terintegrasi, sinergis dan berkesinambungan.

LAMPIRAN I

Evaluasi Hasil RENJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANYUWANGI Tahun 2021

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten :

1. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat terhadap Komoditas Pangan dan Non Pangan
2. Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan yang Berkelanjutan
3. Bertambahnya Nilai Investasi
4. Mengurangi Kesenjangan Tingkat Pendapatan
5. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (TAHUN N)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (TAHUN N)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7+13		15=14/6*100		
I	Meningkatnya daya beli masyarakat melalui stabilitas harga komoditas perdagangan	33004	Usuran Perdagangan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rata-rata persentase kenaikan harga komoditas	0	148.352.000			0	148.352.000	25	25.973.000	25	28.500.050,00	25	31.560.000,00	25	47.628.000	100	133.661.050	100	133.661.050	100,00	90,10	Bidang Perdagangan
		330042.01	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aktivitas Menjaga Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1	28.301.000			1	28.301.000	25	6.294.000	25	4.420.050,00	25	4.400.000,00	25	12.577.000	100	27.691.050	100	27.691.050	100,00	97,84	
		330042.0103	Sub Keg Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah aktivitas monitoring perdagangan antar daerah	1.440	28.301.000			1.440	28.301.000	360	6.294.000	360	4.420.050,00	360	4.400.000,00	360	12.577.000	1440	27.691.050	1440	27.691.050	100,00	97,84	
		330042.02	Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Aktivitas Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok	1	120.051.000			1	120.051.000	24,6575	19.679.000	24,93	24.080.000,00	25,21	27.160.000,00	25,2055	35.051.000	100	105.970.000	100	105.970.000	100,00	88,27	
		330042.0201	Sub Keg Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah aktivitas Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok	5.475	120.051.000			5.475	120.051.000	1.350	19.679.000	1.365	24.080.000,00	1.380	27.160.000,00	1.380	35.051.000	5475	105.970.000	5475	105.970.000	100,00	88,27	
II	Meningkatnya pengembangan koperasi, usaha mikro dan perdagangan	21703	Usuran Koperasi dan Usaha Mikro Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	1	99.971.000			1	99.971.000	25	39.069.000	25	35.354.000,00	25	-	25	4.870.000	100	79.293.000	100	79.293.000	100,00	79,32	Bidang Koperasi
		217032.01	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang dimonitor dan dievaluasi	896	99.971.000			896	99.971.000	25	39.069.000	25	35.354.000,00	25	-	25	4.870.000	100	79.293.000	100	79.293.000	100,00	79,32	
		217032.0101	Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diawasi	896	99.971.000			896	99.971.000	224	39.069.000	224	35.354.000,00	224	-	224	4.870.000	896	79.293.000	896	79.293.000	100,00	79,32	
		21704	Program Penilaian Kesehatan Ksp/USP Koperasi	Persentase KSP/USP Sehat	0	99.991.000			0	99.991.000	-	-	-	56.000.000,00	-	30.081.000,00	36,12%	3.330.000	100	89.411.000	100	89.411.000	100,00	89,42	Bidang Koperasi
		217042.01	Keg Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatannya	120	99.991.000			120	99.991.000	0	-	58,33	56.000.000,00	31	30.081.000,00	9,17	3.330.000	98	89.411.000	98	89.411.000	94,22	89,42	
		217042.0101	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	120	99.991.000			120	99.991.000	-	-	70	56.000.000,00	37	30.081.000,00	11	3.330.000	120	89.411.000	120	89.411.000	94,22	89,42	
		21705	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Pemahaman Perkoperasian	0	525.169.000			0	525.169.000	-	-	-	143.817.000,00	-	15.000.000,00	38,61%	188.085.000	100	477.000.000	100	477.000.000	100,00	90,83	Bidang Koperasi
		217052.01	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang dilatih Perkoperasian	218	525.169.000			218	525.169.000	32	130.098.000	32	143.817.000	36	15.000.000	72	188.085.000	100	477.000.000	100	477.000.000	100,00	90,83	
		217052.0101	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah orang yang dilatih	218	525.169.000			218	525.169.000	69	130.098.000	70	143.817.000,00	79	15.000.000,00	158	188.085.000	218	477.000.000	218	477.000.000	100,00	90,83	



No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (TAHUN N)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (TAHUN N)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7+13		15=14/6*100		
IV.	Mengurangi kesenjangan tingkat pendapatan sektor koperasi, usaha mikro dan perdagangan	33003	Usuran Perdagangan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar rakyat yang mengalami peningkatan standar sesuai SNI	11,22%	524.995.490			11,22%	524.995.490	100	230.982.800		162.871.140,00		14.620.000,00	11,22%	222.569.600	1	515.552.140	1	515.552.140	100,00	98,20	Bidang Pasar
		330032.01	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang Dikelola	21	524.995.490			21	524.995.490	100	115.491.400	0	162.871.140,00	0	14.620.000,00	0	222.569.600	21	515.552.140	21	515.552.140	100,00	98,20	
		330032.0102	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang difasilitasi	21	524.995.490			21	524.995.490	21	115.491.400	0	162.871.140,00	0	14.620.000,00	0	222.569.600	21	515.552.140	21	515.552.140	100,00	98,20	
V.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan urusan koperasi, usaha mikro dan perdagangan	21701	Usuran Koperasi dan Usaha Mikro Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	92,0%	13.492.953.165			92,0%	13.492.953.165	0	2.679.056.000		2.466.569.020,00		2.347.062.000,00	92,0%	4.110.513.339	1	11.603.200.359	1	11.603.200.359	100,00	85,99	Sekretariat
		217012.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	65.998.000			100%	65.998.000	27	25.446.000	18	7.773.410,00	36	14.852.000,00	18	17.887.448	100	65.958.858	100	65.958.858	100,00	99,94	
		217012.0101	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang disusun	5	32.999.000			5	32.999.000	0	-	1	5.463.210,00	3	12.964.010,00	1	14.562.760	5	32.989.980	5	32.989.980	100,00	99,97	
		217012.0106	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah yang disusun	6	32.999.000			6	32.999.000	3	25.446.000	1	2.310.200,00	1	1.887.990,00	1	3.324.688	6	32.968.878	6	32.968.878	100,00	99,91	
		217012.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	7.678.431.415			100%	7.678.431.415	11	1.697.416.000	11	1.416.562.680,00	19	1.341.482.320,00	59	1.455.524.324	100	5.910.985.324	100	5.910.985.324	100,00	76,98	
		217012.0201	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	12	29.999.000			12	29.999.000	3	14.309.000	3	5.091.970,00	3	4.832.000,00	2	5.746.020	12	29.978.990	12	29.978.990	100,00	99,93	
		217012.0205	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	910	7.648.432.415			910	7.648.432.415	195	1.683.107.000	195	1.411.470.710,00	325	1.336.650.320,00	195	1.449.778.304	910	5.881.006.334	910	5.881.006.334	100,00	76,89	
		21701205	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	999.018.690			100	999.018.690							100	979.258.933	100	979.258.933	100	979.258.933	100,00	98,02	
		2170120510	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	750	999.018.690			750	999.018.690							750	979.258.933	750	979.258.933	750	979.258.933	100,00	98,02	
		217012.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100%	816.380.490			100%	816.380.490	15	246.153.000	17	112.620.180,00	22	135.064.960,00	42	278.043.586	100	771.881.726	100	771.881.726	100,00	94,55	
		217012.0601	Sub Keg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	81	35.599.450			81	35.599.450	0	-	81	9.989.790,00	-	-	522	25.053.754	81	35.043.544	81	35.043.544	100,00	98,44	
		217012.0602	Sub Keg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1053	172.894.040			1053	172.894.040	706	134.803.000	-	-	348	15.029.540,00	2	22.896.500	1053	172.729.040	1053	172.729.040	100,00	99,90	
		217012.0603	Sub Keg Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	857	49.998.000			857	49.998.000	530	38.043.000	-	-	327	11.955.740,00	-	-	857	49.998.740	857	49.998.740	100,00	100,00	
		217012.0604	Sub Keg Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah liter bahan logistik kantor disediakan	26041	200.142.000			26041	200.142.000	3.502	31.518.000	5.919	53.271.000,00	5.919	47.097.000,00	10.701	67.887.000	26041	199.773.000	26041	199.773.000	100,00	99,82	
		217012.0605	Sub Keg Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah kotak bahan logistik kantor disediakan	900	14.850.000			900	14.850.000	-	-	-	-	440	6.600.000,00	460	8.250.000	900	14.850.000	900	14.850.000	100,00	100,00	
		217012.0605	Sub Keg Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10077	29.999.000			10077	29.999.000	5.542	17.383.000	-	-	4.532	12.616.860,00	-	-	10077	29.999.860	10077	29.999.860	100,00	100,00	
		217012.0606	Sub Keg Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan perundang-undangan yang disediakan	1249	9.342.000			1249	9.342.000	313	2.128.000	312	2.334.160,00	312	2.333.760,00	312	2.333.760	1249	9.129.680	1249	9.129.680	100,00	97,73	
		217012.0608	Sub Keg Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah kotak makanan dan minuman tamu yang disediakan	888	16.995.000			888	16.995.000	-	-	-	-	350	6.737.500,00	538	10.257.500	888	16.995.000	888	16.995.000	100,00	100,00	
		217012.0609	Sub Keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	70000	265.861.000			70000	265.861.000	5.865	22.278.000	12.381	47.025.230,00	12.000	23.494.560,00	34.193	129.865.072	70000	222.662.862	70000	222.662.862	94,74	83,75	
				Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	900	20.700.000			900	20.700.000	-	-	-	-	400	9.200.000,00	500	11.500.000	900	20.700.000	900	20.700.000	100,00	100,00	
		217012.07	Keg Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	9 buah	72.578.000			900,00%	72.578.000	100%	48.063.000	-	24.515.700,00	0%	-	0%	-	1	72.578.700	1	72.578.700	100,00	100,00	
		217012.0705	Sub Keg Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	6	24.515.000			6	24.515.000	-	-	6	24.515.700,00	-	-	-	-	6	24.515.700	6	24.515.700	100,00	100,00	
		217012.0710	Sub Keg Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	3	48.063.000			3	48.063.000	3	48.063.000	-	-	0	-	-	-	3	48.063.000	3	48.063.000	100,00	100,00	
		217012.08	Keg Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kupon jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	3.466.639.000			100%	3.466.639.000	25%	656.898.000	25%	806.279.300,00	25%	855.662.720,00	25%	1.103.885.398	1	3.422.725.418	1	3.422.725.418	100,00	98,73	
		217012.0801	Sub Keg Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah perangk, materi dan benda pos lainnya yang disediakan	499	4.990.000			499	4.990.000	499	4.990.000	-	-	-	-	-	-	499	4.990.000	499	4.990.000	100,00	100,00	

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (TAHUN N)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (TAHUN N)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Penanggung Jawab																		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																			
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7+13		15=14/6*100																				
1	2	3	4	5	6	Rp.	7	Rp.	8	Rp.	9	Rp.	10	Rp.	11	Rp.	12	Rp.	13	Rp.	14	Rp.	15	Rp.	16																		
		217012.0802	Sub Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	449.999.000			60	449.999.000	15	98.808.000	15	103.029.300,00	15	101.112.720,00	15	104.885.398	60	407.835.418	60	407.835.418	100,00	90,63																			
		217012.0804	Sub Keg Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2100	3.011.650.000			2100	3.011.650.000	525	553.100.000	525	703.250.000,00	525	754.550.000,00	525	999.000.000	2100	3.009.900.000	2100	3.009.900.000	100,00	99,94																			
		<b>217012.09</b>	<b>Keg Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>45</b>	<b>393.907.570</b>			<b>45</b>	<b>393.907.570</b>	<b>2</b>	<b>5.080.000</b>	<b>29</b>	<b>98.817.750,00</b>			<b>69</b>	<b>275.913.650</b>	<b>100</b>	<b>379.811.400</b>	<b>100</b>	<b>379.811.400</b>	<b>100,00</b>	<b>96,42</b>																			
		217012.0902	Sub Keg Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	8	124.206.570			8	124.206.570	2	5.080.000	4	59.125.220,00			2	46.353.650	8	110.558.870	8	110.558.870	100,00	89,01																			
		217012.0906	Sub Keg Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	14	24.830.000			14	24.830.000	-	-	14	9.940.000,00			114	14.890.000	14	24.830.000	14	24.830.000	100,00	100,00																			
		217012.0909	Sub Keg Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1	224.871.000			1	224.871.000	-	-	1	24.752.530,00			-	199.670.000	1	224.422.530	1	224.422.530	100,00	99,80																			
		217012.0910	Sub Keg Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang dipelihara	40	20.000.000			40	20.000.000	-	-	10	5.000.000,00			30	15.000.000	40	20.000.000	40	20.000.000	100,00	100,00																			
Rata-rata capaian kinerja (%)																																											
Predikat kinerja																																											
g keberhasilan kinerja:																																											
bat pencapaian kinerja:																																											
akan dalam triwulan berikutnya :																																											
n dalam Renja SKPD berikutnya :																																											





**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Banyuwangi  
Tahun 2023**

Kode	Usuan/ Bidang Usuan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Pkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Pkiraan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2.17.01.2.05.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	200.000,000		PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata	1 Paket	2.000.000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	
2.17.01.2.05.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	50.000,000		PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata	1 Paket	50.000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	
2.17.01.2.05.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	200.000,000		PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata	100 Laporan	200.000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	
2.17.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah</b>						<b>290.900,000</b>						<b>290.900,000</b>		
2.17.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				44 Unit	200.000,000		PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata	44 Unit	200.000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	
2.17.01.2.05	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah</b>						<b>3.453.799,527</b>						<b>3.453.799,527</b>		
2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.000,000		PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata	1 Laporan	5.000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	449.999,527		PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata	12 Laporan	449.999,527	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	
2.17.01.2.05.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2.996.800,000		PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata	12 Laporan	2.996.800,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	
2.17.01.2.05	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah</b>						<b>416.423,100</b>						<b>416.423,100</b>		
2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				29 Unit	136.603,100		PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata	29 Unit	136.603,100	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	
2.17.01.2.09.08	Pemeliharaan Perakitan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perakitan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	29.820,000		PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata	16 Unit	29.820,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	
2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200.000,000		PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata	1 Unit	200.000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Banyuwangi  
Tahun 2023**

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Pekinerja Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Pekinerja Maja Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2.17.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Geleung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Geleung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi				40 Unit	50.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Perwisata	40 Unit	50.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	
2.17.03	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>						50.000.000						50.000.000		
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota						50.000.000						50.000.000		
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kemandirian, Kefungsian, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Kefungsian, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				869 Unit Usaha	50.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Perwisata	869 Unit Usaha	50.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	
2.17.04	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>						50.000.000						50.000.000		
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000						50.000.000		
2.17.04.2.01.01	Peaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan Penilaian Kesehatan				140 Unit Usaha	50.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Perwisata	140 Unit Usaha	50.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	
2.17.06	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>						50.000.000						50.000.000		
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000						50.000.000		
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pemberdayaan				100 koperasi	50.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Perwisata	100 koperasi	50.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Banyuwangi  
Tahun 2023**

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Pkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Pkiraan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2.11.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA Kecil, DAN USAHA MKRO (UMKM)						2,765,900,000						450,000,000		
2.11.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan						2,765,900,000						450,000,000		
2.11.03.2.01.01	Pengawasan Kesehatan, Keselamatan, Semesta, dan Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kesehatan, Keselamatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				869 Unit Usaha	50,000,000		PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Perkeluarga	869 Unit Usaha	50,000,000		Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	
2.11.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI						50,000,000						50,000,000		
2.11.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						50,000,000						50,000,000		
2.11.04.2.01.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan penilaian Kesehatan				140 Unit Usaha	50,000,000		PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Perkeluarga	140 Unit Usaha	50,000,000		Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	
2.11.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						50,000,000						50,000,000		
2.11.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota						50,000,000						50,000,000		
2.11.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pemberdayaan				100 koperasi	50,000,000		PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Perkeluarga	100 koperasi	50,000,000		Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Banyuwangi  
Tahun 2023**

Kode	Usuan/ Bidang Usuan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Pekoran Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Pekoran Maja Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2	11	07					2,765,900,000						450,000,000		
3	11	07	2.01				2,765,900,000						450,000,000		
2	11	07	2.01	01			1 Dokumen	200,000,000		PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Parwisata	1 Dokumen	200,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	
2	11	07	2.01	02			100 usaha mikro	50,000,000		PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Parwisata	100 usaha mikro	50,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	
2	11	07	2.01	03			200 Unit Usaha	200,000,000		PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Parwisata	200 Unit Usaha	200,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	
2	11	07	2.01	04			1 Unit Usaha	1,315,000,000		PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja	1 Unit Usaha		Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	
2	11	08						7,690,000,000					1,500,000,000		
2	11	08	2.01					7,690,000,000					1,500,000,000		
2	11	08	2.01	01			200 Unit Usaha	1,600,000,000		PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Parwisata	200 Unit Usaha	1,500,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	
3															
3	30							3,550,000,000					650,000,000		
5	30	03						3,250,000,000					250,000,000		
5	30	03	2.01					3,200,000,000					200,000,000		
5	30	03	2.01	01			1 Unit	1,000,000,000		PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	2. Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja	1 Unit		Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Banyuwangi  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Pkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Pkiraan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
										Nasional					Daerah				
3	36	03	2.01	02	Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan					22 Unit	200,000,000	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Perkeluarga		22 Unit	200,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
3	36	03	2.02		<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>							<b>50,000,000</b>						<b>50,000,000</b>	
3	36	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang Dibina					21 pengelola	50,000,000	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Perkeluarga		21 pengelola	50,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
3	36	04			<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>							<b>200,000,000</b>						<b>200,000,000</b>	
3	36	04	2.01		<b>Memjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>							<b>50,000,000</b>						<b>50,000,000</b>	
3	36	04	2.01	03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah aktivitas Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat					1440 aktivitas	50,000,000	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Perkeluarga		1440 aktivitas	50,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
3	36	04	2.02		<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>							<b>150,000,000</b>						<b>150,000,000</b>	
3	36	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan					5475 Laporan	100,000,000	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Perkeluarga		5475 Laporan	100,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
3	36	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota					30 Laporan	50,000,000	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Perkeluarga		30 Laporan	50,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
3	36	06			<b>PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>							<b>200,000,000</b>						<b>200,000,000</b>	
3	36	06	2.01		<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>							<b>200,000,000</b>						<b>200,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Banyuwangi  
Tahun 2023**

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Perkiraan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1.36.04.2.01.01	Peaksanaan Metrologi Legal, berupa Timb, Timb Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perengkapan Dikero Ulang				13000 unit	200.000.000		PENDAWATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Perdagangan	13000 unit	200.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN  
 MATRIKS RENCANA STRATEGIS  
 TAHUN 2021 - 2026

VISI PEMDA : Terwujudnya Banyuwangi yang Semakin Maju, Sejahtera dan Berkah

No.	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Formula indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Renstra 2021-2026	Target Kinerja						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Renstra 2021-2026	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Penanggung Jawab		
						2021		2022		2023							2024		2025		2026								
						Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)						Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1.	Membangun ekonomi inklusif dan pemerataan infrastruktur yang mampu mengukit produktifitas sektor unggulan dan menguatkan ketahanan lingkungan																												
1.1.	Meningkatkan produktifitas dan daya saing sektor koperasi, usaha mikro dan perdagangan yang berkelanjutan	Pertumbuhan PDRB ADHB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	PDRB ADHB sektor perdagangan tahun n - tahun (n-1) dibagi tahun n	%	-6,40	6,86	7,72	8,00	8,35	8,60	8,84	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	Jumlah koperasi aktif dibagi jumlah seluruh koperasi pada tahun n	%	84,13	84,132	99,972	84,82	50.000,00	85,94	70.614,17	87,05	71.026,85	88,17	71.458,69	89,29	71.910,64	Bidang Koperasi
1.1.1.	Meningkatnya pengembangan koperasi, usaha mikro dan perdagangan	Persentase koperasi berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset dibagi jumlah seluruh koperasi dikali 100%	%	53,47	53,70	53,75	53,80	53,86	53,91	53,96	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang dimonitor dan dievaluasi	Jumlah Koperasi yang dimonitor dan dievaluasi pada tahun n	koperasi	864	866	99,972	867	50.000,00	868	70.614,17	869	71.026,85	870	71.458,69	871	71.910,64	Bidang Koperasi
												Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diawasi	Jumlah koperasi yang diawasi pada tahun n	koperasi	100	237	99,972	250	50.000,00	250	70.614,17	250	71.026,85	250	71.458,69	250	71.910,64	Bidang Koperasi
												Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP Sehat	Jumlah KSP/USP sehat tahun n dibagi jumlah KSP/USP yang dinilai tahun n	%	19,03	19,03	99,972	39,65	50.000	41,85	70.614	44,05	71.026	46,26	71.458	48,46	71.910	Bidang Koperasi
												Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatannya	Jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatannya tahun n	koperasi	120	120	99,972	130	50.000	140	70.614	150	71.026	160	71.458	170	71.910	Bidang Koperasi
												Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya tahun n	koperasi	120	120	99,972	130	50.000	140	70.614	150	71.026	160	71.458	170	71.910	Bidang Koperasi
												Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase peningkatan SDM pengelola koperasi	(Jumlah koperasi yang ditingkatkan SDM-nya th n dikurangi jumlah koperasi yang ditingkatkan SDM-nya tahun n-1) dibagi jumlah koperasi yang ditingkatkan SDM-nya tahun n-1 dikali 100%	%	0,00	25,18	525.170	2,87	197.523	3,91	394.968	4,84	397.276	5,64	399.692	6,31	402.220	Bidang Koperasi
												Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang dilatih Perkoperasian	Jumlah Orang yang dilatih Perkoperasian tahun n	orang	258	219	525.170	220	147.523	220	344.968	220	347.276	220	349.692	220	352.220	Bidang Koperasi

No.	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Formula indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Renstra 2020	Target Kinerja						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Renstra 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Penanggung Jawab		
						2021	2022	2023	2024	2025	2026						2021		2022		2023		2024		2025			2026	
																	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)		Target	Rp.(000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
												Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkeroperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah peserta peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkeroperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Jumlah peserta peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkeroperasian serta kapasitas & kompetensi SDM koperasi tahun n	orang	258	219	525.170	220	147.523	220	344.968	220	347.276	220	349.692	220	352.220	Bidang Koperasi
												Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha mikro yang dilatih	Jumlah usaha mikro yang dilatih tahun n	UsahaMikro	0	0	0	25	50.000	25	50.000	25	50.000	25	50.000	25	50.000	Bidang Koperasi
												Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah peserta peningkatan pemahaman dan pengetahuan usaha mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM usaha mikro	Jumlah peserta peningkatan pemahaman dan pengetahuan usaha mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM usaha mikro tahun n	UsahaMikro	0	0	0	250	50.000	250	50.000	250	50.000	250	50.000	250	50.000	Bidang Koperasi
												Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase peningkatan volume usaha koperasi	Jumlah volume usaha koperasi tahun (n) - jumlah volume usaha koperasi tahun (n-1) dibagi jumlah volume usaha koperasi tahun (n) dikali 100%	%	16,08	16,04	99,995	16,20	50.000	16,40	116.546	16,60	117.227	16,80	117.939	17,00	118.685	Bidang Koperasi
												Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberdayakan	Jumlah koperasi yang diberdayakan tahun n	koperasi	0	100	99,995	100	50.000	100	116.546	100	117.227	100	117.939	100	118.685	Bidang Koperasi
												Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi pemberdayaan	Jumlah koperasi yang difasilitasi pemberdayaan tahun n	koperasi	100	100	99,995	100	50.000	100	116.546	100	117.227	100	117.939	100	118.685	Bidang Koperasi
		Persentase UKM terhadap UMKM	Jumlah Usaha Kecil Menengah non pertanian th n dibagi Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah th n dikali 100%	%	7,68	8,00	8,37	8,73	9,09	9,45	9,80	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha tahun n dibagi jumlah usaha mikro yang dilatih tahun n dikali 100%	%	26,34	30	94,999	40	87.831	50	247.218	60	248.663	70	250.175	80	251.757	Bidang Usaha Mikro
												Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang diberdayakan	Jumlah Usaha Mikro yang diberdayakan tahun n	UsahaMikro	79	500	94.999	500	87.831	500	247.218	500	248.663	500	250.175	500	251.757	





No.	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Formula indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Renstra 2020	Target Kinerja						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Renstra 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Penanggung Jawab						
						2021	2022	2023	2024	2025	2026						2021		2022		2023		2024		2025			2026					
																	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)		Target	Rp.(000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
												Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah aktifitas pengawasan metrologi legal	Jumlah aktifitas pengawasan metrologi legal th n	aktifitas	0	25		25		25	50.000	25		50.000	25		50.000	25	50.000			
												Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan pelaku usaha yang difasilitasi pemasaran produk dalam negeri	((Jumlah pelaku usaha yg difasilitasi pemasaran produk th n dikurangi jumlah pelaku usaha yg difasilitasi pemasaran produk th n-1) dibagi (jumlah pelaku usaha yg difalitasi pemasaran produk th n-1) dikali 100%	%	0	0		0	45.655	10		45.912	10,9		46.180	11,5		46.461	11,7647	46.755	Bidang Perdagangan	
												Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah aktifitas pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Jumlah aktifitas pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri th n	aktifitas	0	0		2	45.655	2		45.912	2		46.180	2		46.461	2	46.755	Bidang Perdagangan	
												Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri th n	pelaku usaha	0	0	0	50	25.655	55		25.912	61		26.180	68		26.461	76	26.755		
												Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah pelaku usaha perdagangan yang didata	Jumlah pelaku usaha perdagangan yang didata th n	pelaku usaha	12436	12500	0	12500	20.000	12500		20.000	12500		20.000	12500		20.000	12500	20.000		
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat hasil survey	angka	91,09	91,33	91,53	91,73	91,93	92,13	92,33	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%	90	92	14.666.596	92	13.571.972	92	11.884.373	92	11.953.827	92	12.026.506	92	12.102.569	92	12.102.569	Sekretaria t		
												Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang dilaksanakan th n dibagi jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang direncanakan th n dikali 100%	%	100	100	65.998	100	66.000	100	66.000	100	66.000	100	66.000	100	66.000	100	66.000	100	66.000	Sekretaria t
												Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang disusun th n	dokume n	5	5	32.999	5	33.000	5	35.000	5	35.000	5	37.500	5	37.500	5	37.500	Sekretaria t		







No.	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Formula indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Renstra 2020	Target Kinerja						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Renstra 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Penanggung Jawab			
						2021	2022	2023	2024	2025	2026						2021		2022		2023		2024		2025			2026		
																	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)		Target	Rp.(000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
2.	Membangun SDM Unggul Berkarakter dan Harmonisasi Sosial yang Kondusif																													
2.	Meningkatkan Akses dan Kualitas Komoditas Perdagangan	Indeks harga konsumen	Nilai indeks harga konsumen tahun n	skor	104,04	108	111	114	117	120	123	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	Rata-rata Standart deviasi harga bahan pokok dibagi harga rata-rata bahan pokok per bulan per tahun	%	5,5	5,4	5,3	144.670	5,2	247.218	5,1	248.663	5	250.175	4,9	251.757	Bidang Perdagangan		
	Meningkatnya daya beli masyarakat melalui stabilisasi harga komoditas perdagangan	Indeks harga konsumen makanan dan minuman	Nilai indeks harga konsumen makanan dan minuman tahun n	skor	101,63	103,35	106,32	109,29	112,26	115,23	118,2	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Aktifitas Menjaga Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Aktifitas Menjaga Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting th n	aktifitas	1	1	28.301	2	50.000	2	55.250	2	60.578	2	65.987	2	71.477	Bidang Perdagangan	
												Koordinasi dan sinkronisasi Peningkatan aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah aktifitas Koordinasi dan sinkronisasi Peningkatan aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah aktifitas Koordinasi dan sinkronisasi Peningkatan aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat th n	aktifitas	0	0	21	21	20.000	21	20.000	21	20.000	21	20.000	21	20.000	Bidang Perdagangan	
												Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah aktifitas Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah aktifitas Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat th n	aktifitas	1440	1440	28.301	1440	30.000	1440	35.250	1440	40.578	1440	45.987	1440	51.477	Bidang Perdagangan	
												Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah aktivitas pengendalian harga	Jumlah aktivitas pengendalian harga th n		2	2	120.051	2	44.670	2	141.968	2	138.085	2	134.188	2	130.280	Bidang Perdagangan	
												Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah aktifitas Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah aktifitas Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan th n	aktifitas	5490	5475	120.051	5475	24.670	5475	91.968	5490	88.085	5475	84.188	5475	80.280		
												Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah aktivitas operasi pasar	Jumlah aktivitas operasi pasar th n	aktifitas	15	24	30	30	20.000	30	50.000	30	50.000	30	50.000	30	50.000		

No.	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Formula indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Renstra 2020	Target Kinerja						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Renstra 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Penanggung Jawab		
						2021	2022	2023	2024	2025	2026						2021		2022		2023		2024		2025			2026	
																	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)		Target	Rp.(000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
												Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha pupuk dan pestisida bersubsidi yang sesuai aturan	Jumlah Pelaku Usaha pupuk dan pestisida bersubsidi th n yang sesuai aturan dibagi jumlah seluruh pelaku usaha pupuk dn pestisida bersubsidi th n dikali 100%	%	0	0		90	50.000	90	50.000	90	50.000	90	50.000	90	50.000	
												Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah aktifitas Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah aktifitas Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi th n	aktifitas	0	0		52	50.000	52	50.000	52	50.000	52	50.000	52	50.000	